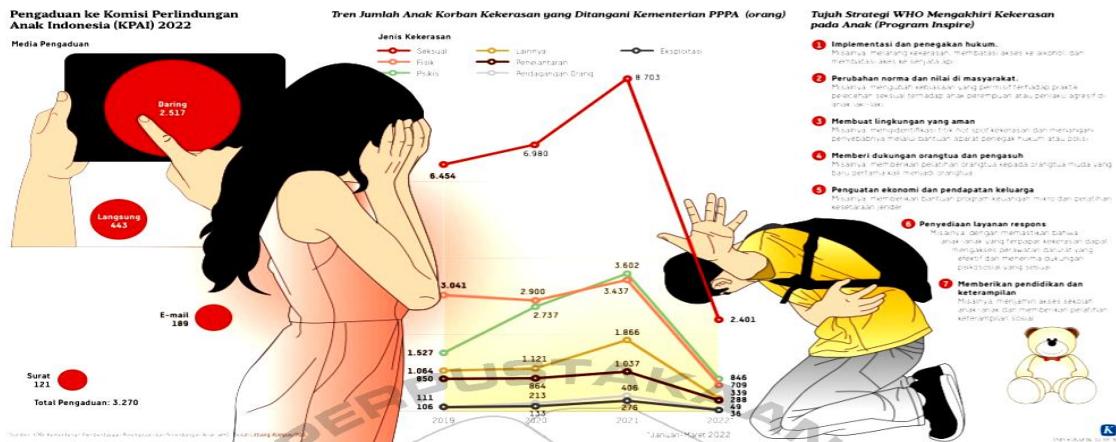




Judul : Melindungi Anak Dan Masa Depan Kita
Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : A

MELINDUNGI ANAK DAN MASA DEPAN KITA



Kekerasan terhadap anak marak terjadi akhir akhir ini, mulai dari penculikan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Perlindungan anak masih menjadi tantangan besar untuk diwujudkan sekaligus menjammin masa depan bangsa.

Anak memiliki penting bagi peradaban. Mandela melukiskan bungan karakter manusia dengan perlakuan kepada

Mendiang pemimpin Afrika Selatan itu, yang dikenal dengan sebutan "Apartheid", mengatakan bahwa jawa atau karakter suatu masyarakat dapat diilah dari dan menunjukkan bahwa memang benar atau tidak benar dalam peradaban dan budaya suatu bangsa. Persamaan dan kesamaan antara Presiden Amerika Serikat (1961-1963) dalam menyebutkan, anak-anak adalah pesona yang akhirnya akan membawa bangsa kita akan kembali temui. Bahkan Mandek maupun Kennedy melihat pentingnya bagi hasil peradaban yang matang dan bersatu bangsa guna.

Masa depan itu akan berada di tangan para yang diberikan atau dialami anak-anak pada saat ini. Investasi berupa masa depan, pengetahuan dan keterampilan, bukti bahwa kualitas lingkungan, dan kesehatan akan ditulai oleh peradaban yang tersebut pada masa depan.

Namun, di sisi lain, pentingnya investasi masa depan bangsa ini juga menuntut sejumlah prasyarat, antara lain berupa pemenuhan hak anak. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan hal ini adalah menghapuskan pelanggaran hak anak dan kekerasan terhadap anak.

Hanya saja, pemenuhan hak anak itu masih menjadi tantangan yang berat bagi negerini. Satu indikasinya terlihat dari laporan sejumlah kasus terkait pelanggaran dan kekerasan terhadap anak yang masih tinggi di Indonesia. Dalam dua bulan terakhir, kasus kekerasan anak menghiasi pemberitaan media di Tanah Air dan menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

reas Yoga Prasetyo
nesia (KPM). Belajaris kontoh kasus ini adalah pelajaran sekolah selama 36 siswa SD di Limpung Tengah, dugaan selakuan melisik di Palembang (Sumatera Selatan), dan pengamatan saat terapi terhadap seorang anak yang mengalami koma. Pada Seluruhnya ada 14 kasus ini pada pula kasus penculikan yang menimpakan anak berusia 5 tahun bawaan gunung Sahari (Jakarta Pusat) dan pembunuhan seorang anak di Masang (Swazies Selatan) dengan motif nafsu seksual dengan cara mengikat dan organisme.

Kasus-kasus ini mengindikasikan masih rentangnya anak eksistensi yang menghantui masyarakat kita. Sejauh ini, secara akumulatif, data KPIA memperlihatkan, sepanjang 4 (empat) tahun ke depan, angka pengaduan anak terhadap pengaduan pada kasus Perindustrian Anak yang mencapai 2.126 kasus. Dan kluaster pengaduan terhadap kasus terbanyak yang dilaporkan adalah korban pelanggaran kebutuhan seksual (3634 kasus). Kasus lain yang banyak dilaporkan adalah kasus pelanggaran hak anak dalam lingkungan keluarga sebanyak 3022 kasus. Dua kasus tersebut dominan dilaporkan oleh ibu yang sedang hamil dan ibu yang dilarang 12 tahun di Banyumas-Jengen.

korban ke KTAJ Seluruh tahun alih, Pada 2021, sebanyak 1.138 casus pengaduan anak korban kekerasan dan 859 anak menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam pantauan KPAL, sejumlah faktor turut menjadi penyebab pelanggaran hak anak dan kekerasan anak. Di antaranya karena lemahnya pengawasuan, kondisi lingkungan rumah yang kurang layak, semiskinan keluarga, hingga pengaruh negatif teknologi di-

tal. Tanpa literasi yang me-
lai, relasi yang semakin de-
ngan teknologi digital
mengajak anak rentan ter-
dampak negatif, seperti
prundangan dan kekerasan
sekaligus secara daring.

nggung jawab
Masih rentananya rasa aman
ang anak munculunci perta-
ngan super, berlangsung
dengan berantakan. Pem-
erintah kepada anak-anak
masa ini? Negara melalui
konstitusi sebenarnya sudah
memberikan jaminan ini. Pasal
82 Ayat (2) UUD 1945 me-
ngaturkan bahwa negara
adalah kelanjutang hidup, tur-
un, dan berkembang, serta
rakat atas perlindungan dari
diskriminasi dan diskriminasi. Ja-
minan itu dijabarkan melalui
Undang-Undang Nomor 33 Ta-
hun 2014 tentang Perlindungan
Anak.

agarra perintungan anak. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan dan pengelenggaran perundungan anak. Pemerintah juga bertugas mengawasi pengelenggaran perlindungan anak. Dalam hal yang lebih teknis, UU Perlindungan Anak memerintahkan pemerintah untuk membangun kapasitas dan kota layak anak sebagai bentuk nyata perlindungan anak.

ANALISIS
litbang Kompas

daerah yang mencapai predikat kabupaten/kota layak anak. Capaian tertinggi penghargaan kota layak anak adalah ketiga, yakni diantara delapan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Bantul, Kota Bogor, dan Kota Depok. Kategori utama ini merupakan jenjang terakhir sebelum mencapai predikat kota layak anak. Diketahui bahwa jumlah kota berpredikat kota layak anak di bawah naungan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KOPAD) Jumlah KPAD pada 2022 masih terbatas.

lang minim, yaitu di 2 provinsi, 6 kota, dan 23 kabupaten.

Strategi

Kekerasan anak dan pelanggaran hak anak tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia. Di tataran dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, secara global diperkirakan hingga 1 miliar anak bersusah 2-17 tahun pernah mengalami kekerasan (who.int, 29.11.2022). Kekerasan ini, menurutnya, sangat bentuk

an ini merupakan segmen pertama, baik pengantar, perundungan, termasuk perundungan secara daring, kekerasan seksual, sampai kekerasan berbasis gender. Selanjutnya, mencantumkan infomasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh orangtua, saudara, pengasuh, teman, hingga orang yang tidak dikenal.

Dampak pada kesehatan, sejauhnya hingga trauma semuanya hidup mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. PBB, Unicef, dan WHO, menyatakan penghentian kekerasan sekuler, perlindungan terhadap anak, dan pengembangan. Sejak 1999, negara-negara dunia pun mengajukan manfaat hak yang sama bagi semua anak melalui Konvensi PBB untuk Hak-Hak

Atau agar setiap anak dapat tumbuh sehat dan diperlakukan dengan adil.

Program "Inspire" itu terdiri
dari strategi penegakan hukum,
nyesuaikan norma, menciptakan lingkungan yang aman,
dan membangun kesadaran anggota.
Selain itu, juga memuat strategi program untuk
meningkatkan ekonomi keluarga,
memudahkan akses pendidikan
dan keterampilan bagi anak,
serta menyediakan layanan peng-
tulungan bagi anak korban ke-
kerasan.

Menurut WHO, sebagian besar
korban kekerasan anak dinilai se-
bagai korban.

t tahun 2016 ini telah terkti memiliki efek pencegahan berbagai jenis upaya kerasan anak.

Di Indonesia, dukungan program itu tampak dari regulasi dan penyediaan layanan publik. UU Perlindungan Sdah Anak 2014, sebagian layanan pencegahan dan respons ini terdilajkan melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2020 seiring dengan tugas Kementerian imberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 22 tentang penyediaan layanan

anak yang memerlukan
segera keterangan.
Secara teknis, kementerian
menambahkan layanan telepon Sabtu
Perempuan dan Anak (0800-11129129),
masyarakat yang memerlukan
dapat mendapatkan informasi
melaporkan melalui telepon
atau melalui WhatsApp
atau
secara langsung
keberadaan instrumen
human dan sosial lepasan
bahwa masyarakat
menjadi harapan untuk
meningkatkan dan mengalihdiri praktik
kekerasan terhadap
Anak. Masa tentu terdampak
kerasanya pada anak akhir
nya menjadi tantangan
pemerintah dan masyarakat

Komitmen ini terus diperkuat agar kekerasan anak dapat berhenti serta hak-hak anak bagian pentingnya benar-benar dapat terpenuhi terlindungi. Tanpa perlindungan yang maksimal, kualitas radahalan masyarakat dan keberlangsungan bangsa di masa mendatang menjadi terancam.